

## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dipaparkan pada bahagian terdahulu (Bab IV), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laju deforestasi di KPHP Dharmasraya paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, mencapai 81,24% dalam decade terakhir. Akselerasi laju deforestasi ini semakin cepat terjadi setelah berakhirnya pengelolaan HPH diikuti dengan kekosongan pengelolaan lahan hutan dan ditambah dengan klaim lahan ulayat masyarakat. Dalam rentang tahun 2014-2016 kebakaran hutan mencapai 207 titik kebakaran. Jenis tegakan yang dahulunya didominasi oleh komoditi hutan seperti Meranti saat ini sebagian besar sudah berubah menjadi perkebunan. Perubahan ini secara tidak langsung juga sudah mengganggu habitat fauna yang ada di dalamnya. Kawasan KPHP termasuk jenis hutan dataran rendah dan terletak dekat dengan kawasan pemukiman penduduk, serta mudah dijangkau sehingga memiliki biaya investasi yang lebih rendah.
2. Karakteristik perambah hutan di kawasan KPHP Dharmasraya di dominasi oleh rumah tangga kelas menengah ke atas, yang jumlah anggota rumah tangga rata-rata 4-5 orang dengan jumlah anggota keluarga produktif rata-rata 2 orang/rumah tangga, usia rata-rata perambah berumur 41 tahun. Jumlah responden yang berpendidikan rendah lebih banyak namun luas lahannya lebih sedikit jika dibandingkan kepemilikan lahan responden yang berpendidikan tinggi. Rata-rata kepemilikan lahan secara keseluruhan sekitar 14,97 ha. Rata-rata luas lahan penduduk lokal 10,07 ha, sedangkan pendatang mencapai 28,89 ha. Persepsi masyarakat yang baik terhadap fungsi ekologi hutan ternyata tidak menjamin terjadinya sikap yang positif, malah dapat bersifat negatif yaitu mengarah kepada perilaku tidak ramah hutan. Telah terjadi perubahan kepemilikan lahan yang awalnya merupakan kepemilikan hutan negara berubah menjadi kepemilikan lahan adat (komunal) dan diiringin dengan kepemilikan privat.

3. Terdapat 3 pola perilaku perambahan hutan yaitu pola tidak ramah hutan, pola campuran dan pola ramah hutan. Pendidikan pendatang lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk lokal, namun pola perambahan penduduk lokal lebih ramah hutan jika dibandingkan dengan pendatang. Namun, jika dilihat berdasarkan luas lahan, ternyata malah berbanding terbalik dimana luas lahan perkebunan karet paling sedikit yakni 822 ha, sedangkan luas perkebunan sawit mencapai 1.203 ha. Sebesar 35,2% responden memilih pola campuran, hal ini perlu menjadi perhatian karena ada kecenderungan responden yang awalnya hanya menanam karet mulai membuka lahan untuk menanam sawit.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola perilaku perambahan hutan secara kualitatif yaitu adanya kekosongan pengelolaan lahan dan kurangnya pengawasan pemerintah serta penegakan hukum negara yang lemah. Telah meningkatkan resistensi masyarakat adat terhadap eksploitasi hutan (merambah hutan) yang mereka klaim sebagai lahan ulayat mereka dan memicu jual beli lahan. Secara kuantitatif faktor-faktor yang significant ( $\text{sig} < 0,05$ ) mempengaruhi pola perilaku perambahan hutan di kawasan KPHP Dharmasraya diantaranya: *X1modified* (faktor pendapatan dan asset), *X3modified* (faktor tenaga kerja keluarga), *X4modified* (faktor pengalaman bertani) dan *X5modified* (faktor persepsi tentang fungsi hutan).

## **B. Saran**

1. Untuk menekan laju deforestasi yang terjadi diperlukan pengawasan dan memperkuat patroli keamanan dengan kehadiran staf KPHP di lapangan. Perlu juga kejelasan penataan batas hutan. Meningkatkan kualitas rehabilitasi ekosistem. KPHP harus mengelola rehabilitasi hutan sebagai kegiatan jangka panjang dan rutin serta melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Selain itu diperlukan pembinaan dan pemantauan pada areal KPHP yang telah ada ijin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan perlunya sosialisasi, penyuluhan ataupun integrasi program pemerintah dengan lahan yang sudah terlanjur mereka

kelola dan koordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait. Terkait karakteristik ekonomi diperlukan adanya sistem pembayaran jasa lingkungan.

3. Untuk lahan yang telah di rambah perlu dilakukan negoisasi dengan pemilik lahan untuk menanam tanaman hutan atau melakukan rehabilitasi dengan kebijakan adanya kuota minimum karet, misalnya dengan menanam 3 batang sawit harus juga menanam 1 (satu) batang tanaman karet. KPH juga perlu melakukan kegiatan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait dan para pihak tersebut untuk menyamakan persepsi tentang pengelolaan hutan dan berbagi informasi dan data yang relevan. Sinkronisasi juga diperlukan untuk menyamakan rencana dan pelaksanaan kegiatan oleh pihak terkait. Perlu adanya insentif agar masyarakat tetap mempertahankan komoditi hutan seperti adanya penghargaan atau subsidi bagi petani karet.
4. Kompleksitas hubungan antara aktor yang terlibat dalam deforestasi perlu diwakili dalam model dinamika penggunaan lahan untuk memproyeksikan jalannya deforestasi di masa depan di Kabupaten Dharmasraya. Model dalam penelitian ini diyakini umum; variabel penting dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan tanpa harus mengubah keseluruhan model. Selain itu juga perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai *transaction cost*.

